

ANALISIS MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Yefni, Muhammad Haris

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: yefni@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat miskin belakangan ini mengalami berbagai problem. Diantara beberapa problem tersebut, salah satunya ialah belum adanya realisasi program pemberdayaan. Tujuan penelitian untuk a). Menjelaskan proses pemberdayaan. b). Menjelaskan output pemberdayaan. c). Menjelaskan model pemberdayaan. d). Menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pemberdayaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi terlibat, wawancara dan peninjauan dokumen. Hasil penelitian menjelaskan proses pemberdayaan melalui pelaksanaan pelatihan: pertama, pelaksanaan pelatihan mengalami kendala yang signifikan. Hal ini terlihat dari: a). Proses penyadaran diganti dengan perekrutan peserta oleh pemerintah setempat. b). Proses transformasi secara kolektif, tetapi efisiensi waktu pelatihan kurang tepat. c). Proses advokasi belum dilakukan. Kedua, metode yang digunakan kurang menjawab permasalahan, peserta hanya mendapatkan penataan dan pengalaman baru. Ketiga, materi pelatihan dipaksakan, terlihat pada setting program pelatihan tanpa memahami permasalahan masyarakat. Kemudian output pelatihan belum mencapai tujuan. Terlihat pada kondisi peserta tidak berubah praplatihan dan pascaplatihan serta belum dilakukan pendampingan. Seterusnya model pemberdayaan menggunakan model community depelopmen. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan model pemberdayaan Pertama, efisiensi waktu pelatihan yang dilematis. Kedua, paradigma pemberdayaan menyamaratakan kriteria kemiskinan. Ketiga, metode pemberdayaan tidak memperhitungkan perbedaan masyarakat. Keempat, materi pelatihan dipaksakan tanpa memperhatikan masalah dan kebutuhan masyarakat. Kelima, program pemberdayaan tidak berkelanjutan.

Keywords : Analisis, Model Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi topik hangat perbincangan, baik dalam rapat pemerintah, perancang undang-undang, diskusi ilmiah, buku-buku, berita-berita di media masa, bahkan di tempat-tempat perkumpulan masyarakat sekalipun. Hal ini muncul sebagai reaksi terhadap jeritan kemiskinan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi yang begitu sulit untuk dicarikan solusi dan menjadi masalah multidimensi, mencakup kurangnya kesempatan, kurangnya kemampuan, kurangnya jaminan dan ketidakberdayaan.

Keberagaman dalam mengartikan kemiskinan sering terjadi, berawal dari sekedar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan berdasarkan penyebabnya. Tahun 1990 definisi kemiskinan semakin diperluas, tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan (Husni Thamrin: 2009).

Berdasarkan perbedaan pengertian tersebut, pemerintah berupaya menciptakan program untuk mengurangi angka kemiskinan yang setiap tahun angkanya selalu mengalami penambahan. Upaya itu dilakukan dengan membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Semua program tersebut mengarah kepada satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercapai ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia selalu menjadi kajian yang menarik untuk terus diperbincangkan karena manusia hidup sesuai dengan zaman. Ada tuntutan situasi dan kondisi yang menuntut manusia untuk menyesuaikannya. Kesesuaian ini membuat manusia *survive*. Sebaliknya, ketidakmampuan beradaptasi akan dianggap gagal. Gagal dalam beradaptasi, gagal memenuhi kebutuhan dasar dan gagal memenuhi segala unsur yang harus dimiliki.

Menyikapi hal di atas, Isbandi Rukminto Adiyang mengatakan pemberdayaan sebagai bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga berani mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Isbandi Rukminto Adi :2001).

Pemberdayaan masyarakat juga merujuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah agar mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (freedom), dalam arti tidak hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
-

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto: 2005).

Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Kampar mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pelatihan pertanian terpadu. Pelatihan dilakukan untuk mendorong kemajuan masyarakat di pedesaan memiliki usaha di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Sehingga masyarakat mandiri secara pangan dan energi serta mampu secara ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan. Di antara beberapa problem tersebut, salah satunya ialah belum terealisasinya program pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta yang ada pada objek penelitian. Kemudian memaparkan semua fenomena yang tampak, selanjutnya data tersebut di analisa dan dikaji secara konfrehensif untuk menemukan kesimpulan akhir (Hadari Nawawi dan Mimi Martini: 1994). Dalam penelitian ini peneliti memahami fenomena yang terjadi dalam proses pemberdayaan dengan melakukan interaksi antara peneliti dan informan dalam memperoleh data untuk selanjutnya dideskripsikan.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengenal dan memahami subjek penelitian secara pribadi dan kelompok. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam (Nurul Zuriyah: 2005). Penelitian kualitatif dipilih karena untuk menjelaskan secara konfrehensif terkait modep pemberdayaan masyarakat.

Penelitian lapangan ini mengambil lokasi di Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah berdasarkan pertimbangan secara akademik, yaitu: di kabupaten ini dilakukan proses pemberdayaan masyarakat miskin dari berbagai desa.

Objek dalam penelitian ini adalah analisis model pemberdayaan masyarakat. Data yang akan digali adalah proses pemberdayaan dengan mengungkapkan fakta dan data lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan, metode dan materi.

Informan yang dipilih adalah informan yang dirasa mampu untuk memberikan banyak informasi berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan memperlancar proses penelitian (Iskandar: 2008). Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan ketika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam penentuan infoman (Sugiyono: 2009). Artinya peneliti tidak membatasi jumlah infoman selama data yang diperoleh menjawab permasalahan penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang dibangun. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, informan pengamat adalah pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap proses pemberdayaan, informan pertamanya adalah ketua pelaksana sekaligus penanggung jawab pelaksanaan pemberdayaan, selanjutnya staf humas atau instruktur dan sekretaris. *Kedua*, informan terlibat adalah instruktur dan pendampingan peserta.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis juga melakukan observasi, dilakukan secara pengamatan terlibat. Pengamatan terlibat yaitu peneliti ikut terlibat dalam proses pemberdayaan serta menjalin interaksi baik antara peneliti dan informan. Keterlibatan peneliti yaitu ikut serta berpartisipasi proses pemberdayaan. Peneliti dalam hal ini, tidak sampai menjadi peserta resmi. Peneliti mengikuti proses pemberdayaan seperti peserta yang lain. Dalam mengikutinya peneliti juga mengamati semua proses pelaksanaan pemberdayaan. Keterlibatan peneliti dimulai dari awal hingga akhir selama pemberdayaan berlangsung.

Selanjutnya, wawancara kepada 7 informan yang terdiri dari tiga pihak pelaksana dan empat peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan informan yang disebutkan di atas. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar prosesnya lebih terarah dan tidak melenceng dari rancangan yang telah dibuat. Satu pertanyaan kemudian dikembangkan sampai tidak memunculkan pertanyaan lagi tentang satu persoalan. Wawancara ini berguna untuk menggali data dan

informasi tentang proses pemberdayaan serta tujuannya sehingga diperoleh data yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Terakhir melakukan analisa bertujuan untuk mengkaji dan memahami informasi dan fenomena-fenomena yang telah terkumpul. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui berbagai proses yang akan dilalui yaitu melalui tahap model air.

Untuk menguji keabsahan data dilakukanteknik triangulasi (*cross cheek*) antara lain triangulasi sumber, yaitu proses triangulasi yang dilakukan dengan sistem berlapis, maksudnya adalah satu pertanyaan terkait proses pemberdayaan ditanyakan kepada setiap informan yang menjadi sumber informasi datadan teori yang terkait dengan penelitian ini. Proses triangulasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data, analisis data, sampai diyakini tidak perlu konfirmasi kepada informan lagi. Triangulasi dilakukan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan (Burhan Bungin: 2003). Data yang telah diuji keabsahannya melalui pemeriksaan terhadap sumber data dan teori kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pelatihan

1. Pelaksanaan Pelatihan

Proses pemberdayaan masyarakat Implikasinya: *Pertama*, proses penyadaran dipahami sebagai sesuatu yang beda dari konsep pemberdayaan sebagai proses penyadaran. Pihak pengelola memahami proses penyadaran sebagai bentuk pengenalan inovasi program kepada peserta bukan proses menyadarkan mereka dengan permasalahannya. Proses tersebut tidak mengintervensi kesadaran pola fikir, sehingga mampu mencapai kesadaran.

Pemahaman penyuluhan dan penyadaran dalam pemberdayaan berbeda dengan yang dipahami Pemerintah Daerah Kampar dan pihak pengelola. Penyuluhan dan penyadaran bukan berarti memperkenalkan progam semata. Tetapi dari sisi pemberdayaan lebih kepada aksi penyadaran sikap, sehingga masyarakat merasa termotivasi untuk memperbaiki diri (Ambar Teguh Sulistiyani:2004). Semestinya penyuluhan disampaikan dalam sosialisasi di desa-desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami pelatihan yang akan dilaksanakan. Proses penyuluhan tidak hanya dalam bentuk pengenalan saja, tetapi memfasilitasi masyarakat

menciptakan prakondisi dan mengetahui kondisi serta permasalahan mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sikap kesadaran masyarakat. Hal yang diintervensi sesungguhnya kemampuan *afektifnya* (sikap) untuk mencapai kesadaran *konatif* (pengetahuan) dan *psikomotorik* (keterampilan). Sehingga sentuhan penyadaran membuka keinginan serta kesadaran masyarakat tentang kondisinya, dengan begitu mereka akan merasa perlu untuk memperbaiki kondisi rumahtangganya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Hal yang paling ironi dan semestinya tidak harus ada dalam proses pemberdayaan yaitu pemberian intensif karena akan menyebabkan masyarakat ketergantungan dan berharap akan ada lagi sejumlah intensif yang lebih besar. Pemberian intensif dilakukan pengelola setelah menjadi peserta. Namun informasi ini sudah sampai kepada peserta ketika direkrut oleh Kepala Desa.

Kebijakan tersebut menunjukkan proses pelatihan terkesan sebagai formalitas semata, tetapi tidak mengarah kepada substansi pelatihan. Dari penjelasan ini banyak asumsi yang bisa dikemukakan seperti program pelatihan bisa saja dijadikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sekelompok orang melalui anggaran yang dikeluarkan. Asumsi lain bisa jadi sebagai batu loncatan untuk menaikkan pamor pemerintah daerah.

Pemberian intensif berpengaruh kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Pengaruh yang dihasilkan, munculnya ketergantungan masyarakat dan apabila intensifnya tidak membantu kebutuhan, mereka meninggalkan program.

Berdasarkan fenomena di atas, kegiatan penyadaran untuk proses pelaksanaan pelatihan diganti dengan kerjasama pihak pengelola dan Kepala Desa untuk mengutus peserta pelatihan. Kegiatan ini akan merekrut peserta dari berbagai profesi bukan atas kehendak mereka sendiri, tetapi pengelola yang menghendaki dengan pemberian intensif. Boleh dikatakan masyarakat tidak disadarkan dan diberikan wawasan untuk memahami kehidupan mereka dan permasalahan yang dihadapi.

Kedua, proses transformasi pengetahuan dan keterampilan dilakukan secara kolektif. Pelaksanaan pelatihan dilihat dari konsep pelatihan sebagai proses pemberdayaan adalah sebuah proses secara kolektif sebagai media intervensi, pengetahuan dan keterampilan digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap untuk memecahkan masalah (Edi Suharto: 2005). Program pemberdayaan dilakukan dengan sengaja untuk memberikan dayadari satu kelompok masyarakat kepada kelompok

masyarakat lain yang membutuhkan daya, masyarakat yang dimaksud yaitu peserta pelatihan. Daya tersebut energi bagi mereka untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya dan untuk penghidupannya agar mereka menjadi lebih mandiri.

Pelaksanaan pelatihan dimulai dari pembinaan shalat subuh berjamaah, kedisiplinan berbaris, senam sehat dan pelatihan pertanian terpadu yang dilaksanakan selama pelatihan, dilihat dari proses pemberdaya ialah bentuk proses transformasi pengetahuan dan keterampilan. Pada proses ini pemberdayaan masyarakat berdasarkan tujuan pemberdayaan tidak saja membangun pengetahuan dan keterampilan yang bernuansa pada pemenuhan material untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun sikap mental dengan membentuk kualitas penghambaan diri kepada Tuhan. Asumsinya dapat dijelaskan bahwa pascapelatihan peserta hidup dengan pola kehidupan baru. Keadaan ini mencerminkan pemikiran masyarakat berkembang dari sebelumnya.

Selanjutnya, kegiatan pelatihan di mulai pada pukul 08:00 waktu setempat dengan mengunjungi sentra pertanian. Sentra percontohan yang dikunjungi itu bernama Kampung Mandiri, menerapkan program Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE), disana terdapat percontohan dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan, semuanya itu ada dalam satu lokasi dan menjadi satu kesatuan sistem pertanian. Peserta pelatihan mendapat penjelasan dari instruktur dan petani pengelola tentang cara pertanian.

Kemudian dari sisi efisiensi waktu pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan pengelola perlu mengkaji ulang dengan pertimbangan yang matang, agar pelatihan tidak sekedar formalitas semata. Meskipun pihak pelaksana mengatakan waktu pelaksanaan sudah mempertimbangkan dan mengurangi dampak resiko yang besar, tetapi dapat dipahami pelatihan yang dilakukan selama dua minggu meniadakan siklus terpenting dalam proses pertanian. Sebaliknya perpanjangan waktu pelatihan akan mengganggu tugas pokok peserta dan menyebabkan permasalahan ketidakikutsertaan mereka dalam pelatihan disamping juga akan menguras anggaran yang banyak.

2. Metode Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan digunakan metode *andragogi* (pendidikan orang dewasa) dengan metode pembelajaran sebanyak 30 % teori dan 70 % praktek lapangan serta pelaksanaan *field trip* ke Kecamatan Tapung dan Sungai Pinang (Sentra Peternakan dan pertanian) dan Sentra Perikanan di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Hasil penelitian menjelaskan ada yang luput dari perhatian pengelola yaitu penerapan metode *andragogi* tidak memperhatikan latar belakang peserta yang bermacam-macam dan tidak hanya sebagai petani, tetapi pedagang, nelayan, buruh serabutan dan lain-lain. Keberagaman peserta tersebut tidak dapat dipungkiri lagi dan dampak dari perbedaan memahami proses penyadaran. Kesalahan tersebut memunculkan permasalahan baru karena peserta berprofesi di luar petani tidak memiliki pengalaman dasar pertanian. Metode tersebut hanya sesuai untuk peserta berprofesi petani saja. Karena peserta yang berprofesi petani memiliki kebiasaan dan pola hidup yang sesuai dengan kebiasaan mereka sehari.

Mengutip pendapat Freire (Totok Mardikanto: 2013) berkaitan dengan metode pendidikan orang dewasa, ia menjelaskan suatu proses penyadaran menuju kebebasan. Proses pemberdayaan harus dibebaskan dari upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk penindasan. Artinya melalui pemberdayaan masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman dan pengembangan daya nalarnya, sehingga di dalam proses pemberdayaan kedudukan fasilitator sebagai pendidik dan masyarakat sebagai peserta didik berada dalam posisi yang setara.

Implikasi pelaksanaan pelatihan sebagian memberikan penataan pada pengalaman masa lampau dan memberikan pengalaman baru, tidak halnya dengan masyarakat berlatar belakang selain petani. Mereka tidak memiliki pengalaman masa lampau sebagai pendukung untuk menata dan menambah pengalaman baru dalam pertanian. Iklim seperti ini mengindikasikan pascapelatihan peserta mengalami permasalahan dan tetap pada kondisi semula, karena akar permasalahan belum terpecahkan. Sehubungan dengan itu, pemilihan metode pemberdayaan masyarakat harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Selain itu, metode selalu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang diberdayakan, sumber daya yang tersedia dan yang dapat dimanfaatkan, serta keadaan lingkungan tempat masyarakat bermukim. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan anggapan pengelola yang menyatakan semua peserta pada dasarnya berasal dari petani karena berada di wilayah pedesaan.

Metode *andragogi* dalam pelatihan pertanian belum menjawab permasalahan yang sedang dan akan terjadi ditengah masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang berasal dari berbagai profesi dan latar belakang. permasalahan tersebut terjadi akibat dari perbedaan pemahaman proses pemberdayaan dalam hal penyadaran. Pihak pengelola

memahami penyadaran sebagai usaha untuk memperkenalkan program, namun sesungguhnya lebih dari itu yaitu upaya menyadarkan masyarakat dari permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

3. Materi Pelatihan

Materi pelatihan terdapat dalam tiga bentuk, yaitu dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Tiga bidang pertanian tersebut diikuti semua peserta. Implikasi materi pelatihan dalam bidang pertanian seperti bertani cabai, bawang dan jagung. Proses pelatihan dalam bidang pertanian dimulai dari menyemai bibit, perawatan, penanaman dan pemupukan. Dalam bidang perikanan proses pelatihan seperti pembibitan ikan patin dan perawatan bibit. Dalam bidang peternakan seperti perawatan sapi, pengelolaan kotoran sapi jadi biogas dan pupuk organik.

Materi pelatihan yang diberikan dikemas dalam bentuk petani modern dan berkembang. Namun pelaksanaan praktek materi pelatihan sepotong-potong. Fenomena itu disebabkan oleh singkatnya waktu pelatihan. Akibatnya pengetahuan yang diperoleh peserta tidak secara keseluruhan.

Selain itu, materi diberikan dengan cara mengunjungi sentra pertanian dan membuat dahulu model percontohan pertanian secara ideal, setelah teruji masyarakat belajar kesana. Model percontohan ideal yang dituju yaitu RTMPE.

Ditinjau dari kajian manajemen pemberdayaan masyarakat pemberdayaan tidak bisa ditempuh dengan cara membuat terlebih dahulu model tertentu untuk ditiru. Karena model yang telah diuji coba tersebut belum tentu bisa diterapkan pada banyak masyarakat (Suyono: 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut terkait materi pelatihan, pelaksana pemberdayaan perlu mengetahui latar belakang dan realita yang terjadi dalam masyarakat heterogen. Keberagaman masyarakat menunjukkan keberagaman permasalahan yang akan mempengaruhi manajemen pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu percontohan model tertentu tidak bisa diterapkan di tengah masyarakat yang heterogen.

Selaras dengan itu, pemberian materi pelatihan terkesan seperti pemaksaan. Pemaksaan itu muncul karena adanya anggapan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kampar perlu diperhatikan dan dikurangi jumlahnya. Untuk menurunkan angka kemiskinan dijawab dengan program pelatihan pertanian terpadu. Anggapan ini dapat pula dijelaskan bahwa pengambil kebijakan tidak mengetahui persis kondisi kemiskinan dan akar permasalahannya. Hal tersebut membuktikan, ternyata paradigma

lama dalam pemberdayaan masih digunakan oleh pengelola pelatihan dan pengambil kebijakan. Kesalahan dalam paradigma ini memunculkan permasalahan yang pelik, seperti peserta yang mempunyai latar belakang petani merasa cocok dengan materi pelatihan yang diikuti meskipun dalam penerapannya mereka hanya menerapkan sebagian pengetahuan (itupun tidak menyeluruh). Sementara bagi masyarakat yang mempunyai latar belakang diluar petani mereka keluar dari pelatihan dan peserta yang bertahan setelah pelatihan kembali ke kondisi semula.

Output Pelaksanaan Pelatihan

Semua program pemberdayaan masyarakat harus menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada, bukan sebaliknya menambah permasalahan baru yang membuat keadaan semakin sulit. Program pemberdayaan memiliki tujuan. Secara umum memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang berkembang, berdaya dan mandiri. Kondisi tersebut tampak dalam perubahan yang terjadi di masyarakat.

1. Kondisi Peserta Prapelatihan dan Pascapelatihan

a. Prapelatihan

Prapelatihan merupakan kondisi peserta sebelum mendapat pelatihan digambarkan dengan profesi yang mereka lakukan sehari-hari. Mencermati semua masyarakat yang menjadi peserta pelatihan berasal dari berbagai ragam kemiskinan rumah tangga. Ragam kemiskinan yang terjadi pada peserta pelatihan termasuk dalam kategori rumah tangga yang rentan. Hal ini sama dengan yang dikatakan Robert Chambers: 1988 tentang rumah tangga yang rentan yaitu rumah tangga sedikit memiliki penyangga untuk menghadapi kebutuhan mendadak. Kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh sedikit persediaan, jika terjadi musibah, maka rumah tangga yang mengalami kerentanan sering menjual persediaan atau barang-barang yang mereka miliki.

Profesi peserta bukan saja dari kalangan pertanian, melainkan dari profesi lain. Seperti buruh tidak tetap, pedagang, seperti berjualan sayuran keliling dan kepasar-pasar yang ada di sore hari, warung kaki lima, seperti jualan kebutuhan sehari-hari, kuli bangunan, menjadi nelayan, bertani, seperti bertani sayur, kacang, cabai rawit, menjadi buruh tani, yaitu pekerja di lahan orang lain, menjadi tukang kayu, seperti mengolah kayu jadi bahan untuk perabotan dan bangunan rumah.

b. Pascapelatihan

Pascapelatihan menjadi suatu kondisi menarik untuk diamati. Pada waktu ini dapat diketahui masyarakat sudah mengalami perubahan dari yang sebelumnya atau tidak. Apapun kondisi yang terjadi menggambarkan pencapaian sebuah lembaga pemberdayaan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga menggambarkan jawaban atas permasalahan yang menjadi persoalan. Hasil tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan evaluasi untuk mencapai perbaikan.

Berdasarkan proses pemberdayaan, salah satunya pengembangan, yaitu masyarakatnya sudah tidak lagi memiliki pola fikiran yang lama, tetapi sudah memulai berfikir menuju perubahan hidup untuk mencukupi kebutuhan (Winarni: 1998). Artinya sikap mental dan kebiasaan lama yang menjerumuskan mereka mulai ditinggalkan dan mereka mulai beranjak ke pola kehidupan baru. Kemudian merujuk kepada tujuan pemberdayaan menurut Totok Mardikanto: 2013, yaitu mengembang pengetahuan, sikap dan keterampilan. Implikasinya alumni pelatihan masih memiliki pola fikir yang lama dan tidak mengalami perkembangan. Mereka masih menikmati sikap mental yang menjerumuskan mereka selama ini. Sikap mental tersebut seperti perasaan takut gagal dalam usaha, tidak memiliki kemampuan dalam meminjamkan modal. Selain itu, belum adanya kelompok tani yang terbentuk dan usaha tani yang berkembang.

Penjelasan tersebut dapat digambarkan cara bertani peserta seperti: *Pertama*, peserta yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan bergerak secara perorangan, hanya menerapkan sebagian pengetahuan saja. Peserta berasal dari latar belakang sebagai petani tradisional. Pascapelatihan mereka menerapkan cara-cara yang digunakan selama pelatihan. Tetapi sebagian saja cara yang digunakan, seperti cara menyemaikan bibit, memilih bibit yang bagus, perawatan bibit dan pemindahan kelahan, dengan perawatan yang seadanya. Perawatan seadanya dilakukan karena lahan yang digunakan tidak begitu luas.

Kedua, peserta yang tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan kembali menjalankan profesi semula. Tidak ada pengaruh pada peserta, dikasi pelatihan dan tidak dikasi pelatihan sama saja. Artinya sikap dan keterampilan mereka tidak terintervensi untuk mencapai kesadaran kognitif. Hal ini tampak setelah menjalankan pelatihan, peserta kembali kewilayah masing-masing dan menjalankan rutinitas biasa, mereka yang tadinya beprofosi sebagai pedagang, nelayan, buruh tani dan serabutan, menjalankan profesinya kembali.

Berdasarkan kondisi peserta pascapelatihan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pemberdayaan dalam pelaksanaan pelatihan, sebagai berikut: *Pertama*, paradigma yang digunakan paradigma lama yang kurang berorientasi pada potensi dan kemandirian sumber daya manusia, pemaksaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberian intensif (Moeljarto Tjokrowinoto: 2002). Kemiskinan di Kabupaten Kampar harus dikurangi angkanya. Salah satu upayanya melalui pelatihan pertanian terpadu. Artinya tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, memahami kebutuhan mereka dan masyarakat tidak diberi kebebasan seluasnya dalam mengekspresikan dirinya. Kesalahan dalam pemberdayaan selama ini karena sering menggunakan sudut pandang orang luar. Sehingga pengambil kebijakan tidak mengetahui apa sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat. Seperti penerapan pelatihan pada seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kampar dalam mengurangi angka kemiskinan dan pemahaman proses pemberdayaan dalam tahapan penyadaran yang hanya dipahami sebagai upaya penyuluhan dan pengenalan program pemberdayaan.

Kedua, strategi yang kurang tepat dalam menangani permasalahan lapangan akan mengalami dilema dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan menggunakan *top down* dengan memberikan model percontohan pertanian yang teruji, tetapi penggunaan strategi ini tidak melihat kepada masyarakat yang heterogen. Tidak bisa digunakan sebuah model percontohan tertentu untuk diterapkan pada semua masyarakat, karena permasalahan dalam sebuah komunitas juga berbeda. Hal ini dapat dicermati dalam teori manajemen pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan *top down* yaitu program sudah diatur dari atas dan diturunkan pada masyarakat. Masyarakat tidak diberi kesempatan menggali permasalahan dan kebutuhannya. Asumsinya masyarakat pasti membutuhkan bantuan dan modal (Edi Suharto: 2009). Dalam pelaksanaan pelatihan bantuan yang dimaksud seperti strategi yang menggunakan model percontohan. Model percontohan dijadikan standar yang tepat dan sesuai untuk diterapkan pada semua masyarakat, agar peserta mencontoh pertanian atau usaha yang dilakukan.

2. Pendampingan Kepada Peserta

Proses terakhir dari pemberdayaan yaitu proses advokasi atau pendampingan. Proses ini terjadi setelah proses penyadaran dan transformasi diberikan. Pada proses

sebelumnya masyarakat sebagai objek pemberdayaan. Proses pendampingan masyarakat sudah menjadi subjek pemberdayaan.

Pendampingan yang diberikan berupa memberikan inovasi dan mempengaruhi penerima manfaat dengan teknik tertentu sampai menerima manfaat itu dengan kesadaran dan kemampuannya untuk mengadopsi inovasi yang disampaikan. Selain itu juga menjembatani peserta dengan pemerintah dan lembaga pemberdayaan disamping juga memberikan solusi atas kendala yang dihadapi selama mereka memulai pola kehidupan baru (Totok Mardikanto: 2013). Pendampingan juga proses pengayaan atau peningkatan kualitas agar masyarakat mencapai kemandirian. Kemandirian ditandai dengan kemampuan masyarakat memikirkan pemenuhan kebutuhannya dan berinovasi terhadap lingkungan atau melakukan usaha untuk perbaikan.

Implikasinya proses pendampingan kepada peserta alumni belum dilaksanakan karena belum ada laporan masalah dari masyarakat yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelompok tani di desa-desa. Padahal tujuan akhir dari pelatihan ini terciptanya kondisi kelompok petani masyarakat yang bergerak secara swadaya. Dengan demikian kondisi tersebut dapat menghilangkan keberfungsian fasilitator di kecamatan sebagai pendamping. Iklim seperti ini menjelaskan proses pemberdayaan melalui pelatihan mengalami kendala yang signifikan.

Sebagaimana dalam penjelasan terdahulu bahwa pencapaian dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbentuknya struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat keswadayaan dan partisipasi (Zubaedi: 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, mencermati pelaksanaan pelatihan menyebutkan tujuan program pelatihan belum tercapai. Kondisi tersebut ditandai, adanya masyarakat yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara perorangan. Semestinya tujuan akhir program pelatihan terbentuknya kelompok tani secara swadaya. Tujuan tersebut terkandung makna tujuan pemberdayaan masyarakat, seperti meningkatkan pengetahuan, pengembangan sikap dan perkembangan keterampilan. Hal ini disebabkan karena tujuan program belum mendorong terbentuknya kelompok tani secara swadaya disamping belum baiknya manajemen.

Model Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan di banyak negara-negara berkembang selalu menggunakan berbagai macam model. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang ingin diselesaikan terlaksana

dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Model merupakan bentuk nyata dari perencanaan program. Lebih tegas dinyatakan manifestasi dari identifikasi dan analisa yang mendalam menghasilkan bentuk kerangka kerja untuk mencapai perubahan. Seperti yang biasa terjadi dalam proses pemberdayaan, ketika masalah telah dipahami, selanjutnya menciptakan model yang tepat untuk menjawab permasalahan. Pada penjelasan lalu, satu model tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang berada di luar wilayah kajian atau disemua wilayah. Satu model hanya bisa digunakan pada masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah. Mungkin dari sisi pembagian model pemberdayaan boleh jadi menggunakan model yang sama, tetapi implikasinya berbeda. Jadi dari sisi penamaan boleh jadi menggunakan model yang sama tetapi implikasinya berbeda.

Lebih lanjut, penggunaan model pemberdayaan dalam penjelasan terdahulu ada tiga, yaitu a. sentralisasi, b. partisipasi dan c. *community development*. Dari beberapa model pemberdayaan yang ada ternyata pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan model *community development*. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman observasi yang dilakukan, bahwa dari semua proses pemberdayaan yang dilakukan terkandung tiga inti dari pemberdayaan yang dikatakan sebagai proses. *Pertama*, pemberdayaan melaksanakan proses pelatihan pertanian dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. *Kedua*, melaksanakan pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan dengan menggunakan metode *andragogy*. Hal ini bermaksud agar masyarakat memiliki bekal ilmu dan pengetahuan untuk diterapkan pascapelatihan. *Ketiga*, melakukan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkan arahan serta pemecahan masalah, tetapi penarapan advokasi belum terlaksana dengan baik.

Kelebihan dan Kekurangan Model Pemberdayaan Masyarakat

Proses pelaksanaan pelatihan menunjukkan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Hasil yang ingin dicapai terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Selain itu terbentuknya kelompok petani secara swadaya. Selama kegiatan berlangsung, dimungkinkan terjadi berbagai problem menghambat tujuan akhir pelatihan. Berbagai kelebihan dan kekurangan dapat juga dipahami. Adapun kelebihan dan kekurangan model pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi Pelaksanaan Waktu Pelatihan

Masyarakat miskin perlu diberdayakan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik dan mandiri (Aziz Muslim: 2009). Untuk mencapai kemandirian proses pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan butuh waktu. Dalam suatu kondisi peserta bisa mengikuti pelatihan meskipun tidak mendapatkan pengetahuan penuh satu siklus pertanian. Namun dalam kondisi yang lain peserta tidak mengetahui perkembangan terpenting dalam siklus pertanian. Sebaliknya panjangnya waktu pelatihan membuat peserta tidak tenang, khawatir dengan kondisi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan meninggalkan pelatihan disamping juga memperhitungkan besarnya anggaran yang dikeluarkan.

2. Paradigma Pemberdayaan

Paradigma pemberdayaan dalam pelatihan berorientasi pada potensi dan kemandirian sumber daya manusia. Namun dalam pemahamannya penyelenggara masih menggunakan paradigma lama yang beranggapan pendekatan pembangunan dan penggunaan teknologi yang berasal dari atas selalu dinilai baik (Totok Mardikanto: 2013). Selain itu, anggapan pemerintah kemiskinan sesuatu yang absolut dengan menyamakan kriterianya untuk semua masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan. Pada kondisi tertentu masyarakat bisa diarahkan dan diintervensi untuk masuk kedalam program pelatihan. Tetapi pada kondisi yang lain pascapelatihan masyarakat tidak mampu menjawab permasalahannya sendiri, ditambah lagi paradigma masyarakat pelatihan sebagai sebuah proses yang panjang dan tidak menjawab kebutuhan sekarang.

3. Metode Pemberdayaan

Penerapan metode *andragogi* adalah suatu bentuk metode pemberdayaan yang memberikan peserta aktif dan mempunyai kesamaan derajat dengan fasilitator dengan tujuan untuk membungkus pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru yang lebih modern (Totok Mardikanto: 2013). Melihat kondisi masyarakat yang heterogen, latar belakang peserta tidak hanya berprofesi sebagai petani. Di satu sisi kondisi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat mempunyai latar belakang petani meskipun dalam penerapannya hanya sebagian pengetahuan saja. Namun pada kondisi yang lain akan mengalami permasalahan pada masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang petani. Apabila diterapkan metode *andragogi* yang dimaksudkan bahwa peserta sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian. Peserta yang mempunyai

latar belakang di luar pertanian mengalami permasalahan dalam prakteknya. Permasalahan tersebut seperti mereka tidak cepat mengerti dan memahami apa yang disampaikan instruktur dalam waktu yang singkat dan cepat serta kurang motivasi dalam mendirikan usaha tani, karena pelatihan ini berbeda dengan profesi mereka sebelumnya. Akibatnya proses pelaksanaan pelatihan hanya menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi tidak menjawab permasalahan yang menjadi persoalan masyarakat.

4. Materi Pelatihan

Materi pelatihan memberdayakan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Namun apabila melihat kondisi masyarakat memiliki latar belakang yang heterogen terkesan seperti dipaksakan. Di satu sisi masyarakat yang mempunyai latar belakang petani, hasilnya hanya menambah pengetahuan dan keterampilan, namun tidak mengubah sikap dan memecahkan permasalahan mereka. Padahal dalam teori pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menjawab permasalahan sekarang dan akan datang yang dihadapi masyarakat (Aziz Muslim: 2003). Sementara itu masyarakat yang memiliki latar belakang yang lain permasalahan mereka belum terjawab. Penyebabnya pemerintah tidak mengetahui kondisi dan permasalahan lapangan. Sehingga semua materi jika diterapkan kepada masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda, akan mengalami permasalahan.

5. Keberlanjutan Program Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan membangun sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kesejahteraan (Setiana L : 2005). Melihat proses pelaksanaan pelatihan yang tidak sampai pada proses advokasi, terlihat masyarakat seperti dilatih, dipersuasi diberdayakan tetapi hanya bersifat semu. Dalam kondisi tertentu upaya ini memberikan daya melalui transfosmasi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Namun pada kondisi yang lain upaya ini tidak berlanjut sampai pada tahap advokasi. Hal ini ditandai dengan kondisi peserta pascapelatihan tidak mendapatkan pendampingan.

Kelebihan dari model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu mendatangi fasilitator. Biasanya dalam program pemberdayaan yang lain sebaliknya, fasilitator yang mendatangi masyarakat. Hal ini menunjuka sebuah hal yang baru. Namun demikian kekurangannya bermula dari pemahaman paradigma pemberdayaan masyarakat yang

menggunakan paradigma lama. Paradigma ini menyamaratakan semua permasalahan dalam masyarakat dan dibuatkan setting program untuk menanggulangnya.

KESIMPULAN

Mengacu kepada permasalahan dan pertanyaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan pelatihan pertanian terpadu mengalami kendala yang signifikan. Hal ini nampak dari: a). Proses penyadaran kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari proses penyuluhan dan penyadaran diganti dengan perekrutan peserta berdasarkan utusan Kepala Desa, ditambah lagi peserta yang mengikuti pelatihan diberikan intensif siteming. b). Proses transformasi pengetahuan dan keterampilan dilakukan secara kolektif yang dimulai dari pembinaan shalat berjamaah, kedisiplinan dan kesehatan serta pelatihan pertanian terpadu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bernuansa pada pemenuhan material dan spiritual. Tetapi dalam pelaksanaan pelatihan efisiensi waktu yang digunakan kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan waktu pelatihan selama dua minggu menghilangkan siklus terpenting dalam pertanian, sementara perpanjangan waktu dapat mengganggu tugas pokok peserta. c). Proses penguatan atau advokasi belum dilakukan karena belum ada fasilitator, yang ada hanya pengawas yang belum melaporkan permasalahan masyarakat yang diakibatkan belum terbentuknya kelompok tani di desa secara swadaya.

Kedua, metode pelatihan *andragogi* yang digunakan kurang menjawab permasalahan yang sedang dan akan terjadi dalam masyarakat yang heterogen. Hal ini terlihat dari peserta mempunyai latar belakang petani hanya memberikan penataan pada pengalaman masa lampau dan memberikan pengalaman baru, tidak halnya dengan peserta yang mempunyai latar belakang selain petani. *Ketiga*, materi pelatihan pertanian terpadu dikemas dalam bentuk pertanian modern dan berkembang. Tetapi pemberian materi pelatihan terkesan dipaksakan. Seperti nampak dari kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan dijawab dengan program pelatihan pertanian tanpa memahami permasalahan yang sebenarnya ditengah masyarakat heterogen.

Kemudian *output* pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pelatihan belum mencapai tujuan, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, cara bertani peserta prapelatihan dan pascapelatihan tidak berubah. Hal ini dapat dilihat dari: a). Peserta

mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan hanya sebagian saja (itupun tidak penuh).
b). Peserta yang tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan kembali menjalankan profesi sebagai rutinitas yang biasa dilakukan. *Kedua*, pendampingan kepada peserta pelatihan belum dilakukan. Seperti diketahui bahwa di tingkat kecamatan hanya ada pengawas yang belum menjalankan fungsinya dalam melaporkan permasalahan petani karena belum terbentuknya kelompok tani secara swadaya dan tidak bersinerginya pengawas di kecamatan.

Seterusnya model yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu disebut dengan *community development*. Suatu model yang menerapkan konsep pemberdayaan dalam bentuk proses pelatihan yang dimulai dari penyadaran, transformasi dan advokasi.

Selanjutnya kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: *Pertama*, efisiensi pelaksanaan waktu pelatihan yang dalam suatu kondisi peserta bisa mengikuti pelatihan meskipun hanya mendapatkan sebagian pengetahuan tentang pertanian. Namun sebaliknya perpanjangan waktu pelaksanaan pelatihan mengganggu pekerjaan pokok peserta disamping juga memperhitungkan anggaran. *Kedua*, pemahaman paradigma pemberdayaan yang menganggap kemiskinan disamaratakan kriterianya untuk semua masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan. Pada kondisi tertentu masyarakat bisa diintervensi, tetapi pascapelatihan masyarakat tidak mampu menjawab permasalahannya sendiri. *Ketiga*, penggunaan metode pemberdayaan yang belum sesuai dengan keberagaman peserta. Di satu sisi memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat mempunyai latar belakang petani, namun tidak halnya dengan masyarakat mempunyai latar belakang selain petani. *Keempat*, penggunaan materi pelatihan yang terkesan dipaksakan tanpa mengetahui akar permasalahan dan kebutuhan yang dipenuhi. Akibatnya masyarakat mempunyai latar belakang petani hanya menambah pengetahuan dan keterampilan semata, namun tidak mengubah sikap dan pola pikir, sementara itu permasalahan masyarakat di luar pertanian tidak terjawab. *Kelima*, program pemberdayaan berkelanjutan. Hal ini dapat dicermati masyarakat hanya dilatih, dipersuasi dan diberdayakan. Dalam suatu kondisi upaya ini memberikan daya melalui transformasi pengetahuan dan keterampilan, namun kondisi yang lain upaya ini tidak berlanjut sampai advokasi untuk mencapai kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Anwas, Oos, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Azwar, Welhendri, *Sosiologi Dakwah*, Padang: Imam Bonjol Press. 2014.
- Bimo, Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Adi Yogyakarta, 2003.
- *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Study Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Dimulai dari Belakang*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Harahap, Syahrin, *Islam dan Implementasi Pemberdayaan*, Kopen Banteng: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, cet. 2, Bandung: Humaniora, 2011.
- Husni, Thamrin, *et al*, *Kemiskinan di Riau Realitas dan Kebijakan*, Pekanbaru: Suska Press, 2009.
- Kohar, Wakidul, *Komunitas Penengah Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahendrawati, Nanih, *et al*, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Mardikanto, Totok, *et al*, *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Martono Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muslim, Aziz, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta, Penerbit Teras, 2009.
-

- Rukminto, Adi Isbandi *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran Jilid 2*, Jakarta:lentera Hati, 2011.
- Soleh, Chabib, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya?)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Suharto, Edi, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Teresa, Aprilia, *et al*, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wiratnolo, Randy, *et al*, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2007.
- Zulbaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2013.
- Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis Welfare*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012
-